

**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAERAH,
PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus Pada Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

OLEH:

MOCHAMMAD AZAM MAULANA

NPM. 22101082168



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2026

MOTTO

“Mustahil Allah sudah membawamu sejauh ini hanya untuk gagal, tetaplah
berusaha dan berdoa”



**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN
TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Kasus Pada Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi

Oleh :

MOCHAMMAD AZAM MAULANA

22101082168



Tanggal di setujui :

Jum'at, 16 Januari 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Hj. Maslichah, SE., M.Si., Ak., CA.



Dr. Dewi Diah Fakhriyyah, SE., M.SA



SKRIPSI

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Kasus Pada Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang)

MOCHAMMAD AZAM MAULANA
NPM. 22101082168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/tanggal : Jum'at, 16 Januari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Hj. Maslichah, SE., M.Si., Ak., CA.



Dr. Dewi Diah Fakhriyyah, SE., M.SA

Anggota Dewan Penguji Lain



Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA., CBV., CERA

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar:

SARJANA AKUNTANSI

Pada Hari/tanggal : Jum'at, 16 Januari 2026



Affudin, SE., M.SA., Ak.

Ketua Jurusan



Dr. Dwiyani Sudaryanti, SE., MSi., Ak.

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Jurusan : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah

STATUS : UNGGUL



Alamat : Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang 65144 telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : **Mochammad azam maulana**
NPM : **22101082168**
Program Studi : **Akuntansi**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.Yang diuji pada tanggal : **16 Januari 2026** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya.

Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat atau keseluruhan hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat maupun pikiran penulis lain yang diakui sebagai hasil tulisan saya sendiri, dan dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal tersebut diatas, maka saya menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri dan jika terbukti saya melakukan hal tersebut diatas seolah-olah hasil karya saya sendiri, maka gelar dan Ijazah yang diberikan Universitas Islam Malang berhak untuk dibatalkan.

Malang, 30 Januari 2026

Y: an,


8C540AJX75755540
Mochammad azam maulana

Ketua Penguji

Hj. Maslichah, SE., MS.i, Ak.
CA.

Anggota

Dr. DEWI DIAH FAKHRIYYAH,
S.E., M.SA

Anggota

Dr. Nur Diana SE, MSi, CMA,
CBV, CERA



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.1103/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Dasarkan surat dari : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG ;
Nomor : 1818/B41/U.08/D/G.46/VII/2025;
Tanggal : 28 JULI 2025;
Isi : SURAT IZIN MENELITI.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NAMA	NIK	NIM	PRODI
Mochammad Azam Maulana	3573032005020008	22101082168	Akuntansi

Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA;
Lokasi Penelitian : KELURAHAN MADYOPURO
JL. RAYA MADYOPURO NO. 40, KEL. MADYOPURO, KEC. KEDUNGKANDANG.

Atas ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
Berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Surat SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Disampaikan Yth :

Sdr. Bakesbangpol Kota Malang;
Sdr. Lurah Madyopuro

tan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan rasa sepenuh hati yang amat sungguh dalam kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berjasa di setiap perjalanan yang ku tempuh.

Kepada kedua orang tuaku bapak dan ibu dengan segala pengorbananya yang amat sangat luar biasa untuk hidupku, yang selalu ada dalam kondisi sesulit apapun, serta menjadi penyemangat di setiap langkah kecilku. Merekalah yang menjadikan ku sampai bisa ke titik ini dimana titik yang tak pernahku pikirkan sebelumnya dan tidak lupa juga kakak dan keluarga atau saudara ku disini yang menemaniku dan mendukung saya sampai bisa dititik sekarang ini.

Untuk diriku sendiri Mochammad azam maulana terima kasih atas perjuangan mu selama ini, jangan berhenti berjuang karena perjalanan mu masih panjang dan tak akan ada ujungnya. Teruntuk teman-temanku yang menjadikan ku keluarga selama ini, Fendi, Kikin, Uzan, Firansyah, Hamid, Farel dan masih banyak lagi yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu. terima kasih atas perjalanan dan pengalaman selama ini, tidak terasa pertemanan kita berjalan sejauh ini hingga sampai di titik ini dimana kita nantinya akan berpisah oleh keadaan.

Ungkapan ini belum cukup untuk menggambarkan begitu amat besarnya rasa terima kasihku kepada orang-orang yang berjasa dalam setiap langkahku. Mohon maaf yang begitu besar ku ucapkan kepada kalian semuanya dan terima kasih sebanyak-banyaknya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil allamin. Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas kelimpahan nikmat serta hidayah-Nya khusus nya dalam proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam Wal Iman. setelah melewati rintangan yang sulit, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan Transparansi Anggaran Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus di Desa Madyopuro)”**

Penyusunan ini termasuk salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar strata (S1) program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, membantu penulis atas penyelesaian skripsi hingga selesai.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

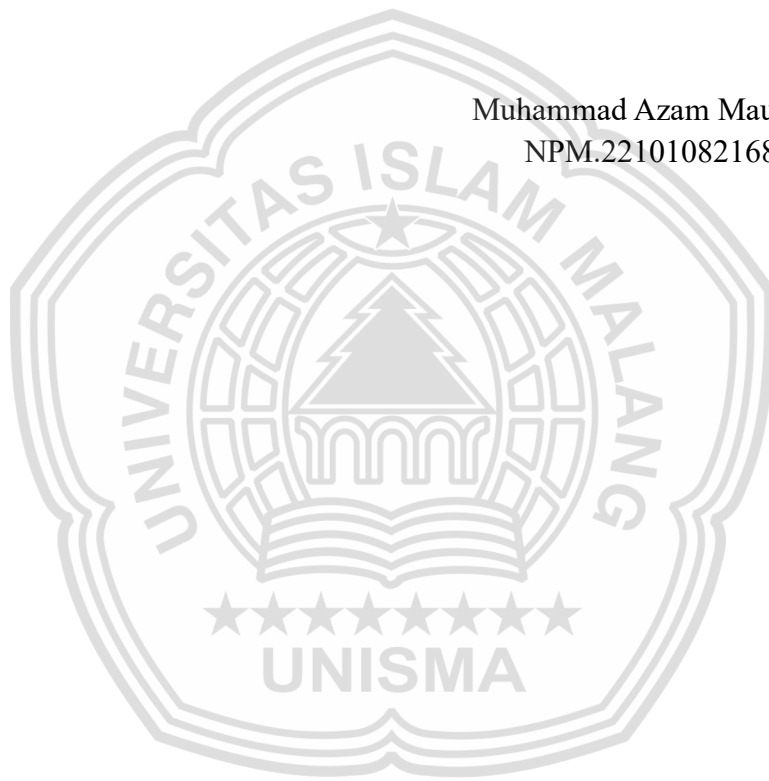
1. Bapak Prof. Drs. H. Junaidi Mistar, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Bapak Afifudin, SE, M.SA, Ak., CAP., CBV selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
3. Ibu Dr. Dwiyani Sudaryati SE., MSi selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

4. Ibu Hj. Maslichah, SE., MS.i, Ak. CA selaku dosen pembimbing 1, terima kasih atas bimbingan, kritik, saran dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan salah satu hal yang sampai saat ini selalu saya syukuri. Terima kasih banyak Bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan serta selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang tanpa hentinya.
5. Ibu Dr. Dewi Diah Fakhriyyah. S.E., M.SA selaku dosen pembimbing 2 saya ucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan arahan serta masukan terhadap penulisan skripsi saya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan serta kemudahan segala urusannya dan juga rezeki.
6. Seluruh dosen serta civitas akademika Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang begitu amat banyak selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Malang.
7. Dua orang yang paling berjasa dalam setia langkah-langkah kecil perjalanan hidup saya, ibu Siti Mufidah dan bapak Jumaadi, terima kasih banyak telah berkorban serta doa kalian yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT selalau melancarkan rezeki dan menjaga kalian dalam hal apapun.
8. Kepada saudara saya terima kasih sudah memberikan kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik saya, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang.

9. Teman-teman Fendi Fidiyanto, Moch Hidayatus Sholihin, Firansyah Dwi Saputro, Fauzan Adhim, Farel vias, Abd Hamid yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya selama ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya. Semoga kita semua di berikan kesuksesan dunia dan akhirat.

Malang, 16 Januari 2026

Muhammad Azam Maulana
NPM.22101082168



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Mochammad Azam Maulana

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 20 Mei 2002

Nomor Pokok Mahasiswa : 22101082168

Email : 22101082168@unisma.ac.id

No Handphone : 085738424273

Nama Orang Tua : Jumaadi (Ayah)
: Siti Mufidah (Ibu)

Alamat : Jl Ki Ageng Gribig Gg 1 Mirej RT 02 RW
04 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang

Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Kota / Kabupaten	Tahun Lulus
1	SDN Madyopuro 3	Kota Malang	2014
2	SMP An Nur Bululawang	Kabupaten Malang	2017
3	SMKN 6 Malang	Kota Malang	2020
4	Universitas Islam Malang	Kota Malang	2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lurah, sekretaris lurah, dan bendahara yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah yang diterapkan melalui aplikasi SISKEUKEL mampu meningkatkan efisiensi dan keakuratan pencatatan serta pelaporan keuangan desa. Pengendalian internal berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Transparansi anggaran memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Secara simultan, sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti adanya rangkap jabatan dan keterbatasan literasi keuangan masyarakat yang berpotensi mempengaruhi penerapan prinsip good governance secara optimal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

Kata kunci : Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, transparansi anggaran, akuntabilitas, keuangan desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the regional financial system, internal control, and budget transparency on improving the accountability of village financial management in Madyopuro Village, Kedungkandang District, Malang City. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informants in this study consisted of the village head, village secretary, and treasurer who have direct roles in managing village finances. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the regional financial system implemented through the SISKEUKEL application is able to improve efficiency and accuracy in recording and reporting village financial data. Internal control plays a role in ensuring compliance with regulations, minimizing administrative errors, and improving the reliability of financial reports. Budget transparency provides public access to information related to the planning, implementation, and accountability of village finances, thereby increasing public trust in village government.

Simultaneously, the regional financial system, internal control, and budget transparency have a positive effect on improving the accountability of village financial management. However, several obstacles were found, such as overlapping job roles and limited financial literacy among the community, which may affect the optimal implementation of good governance principles.

This research is expected to contribute to village governments in improving the quality of transparent, effective, and accountable financial governance and serve as a reference for future research in the field of public sector accounting.

Keywords: Regional financial system, internal control, budget transparency, accountability, village finance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik, (Tania, 2020).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder, untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaporan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta terbebas dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan dinilai berupa Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Opini Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat, (Budiman Slamet & Nadia Dwi Irmadiani, 2022).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki system pencatatan dan pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical repoting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan

(termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemiliknya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung (Amrul, 2024).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas. Observasi ini menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah, mereka telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat seperti: mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, memperbaiki aturan internal serta mekanisme pengendalian, dan membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan, (F.Albugis, 2016).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Komarasari, 2017).

Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2019). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, (Leunupun et al., 2022).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008), (Fiqri & Sari, 2019).

Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan sistem pengendalian intern yang memadai sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak

diinginkan. Sistem pengendalian intern juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi (Maruta, 2015).

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan. Dalam arti sempit, pengawasan intern merupakan pengecekan penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjumlahan menurun (*footing*). Dalam artian luas, pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. (Maruta, 2015)

Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau

menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik, (Mokoginta, 2021).

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*), kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya, dan sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu . Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Memperhatikan penjelasan tersebut terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik. Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula, (Ngakil & Kaukab, 2020).

Desa Madyopuro, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menarik untuk dijadikan objek penelitian karena posisinya yang strategis dan aksesibilitas informasinya. Kajian terhadap desa ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran diterapkan, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bukti empiris mengenai hubungan antara variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, aparatur desa, maupun lembaga pengawas dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan literatur mengenai manajemen keuangan sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian dengan judul:
Pengaruh sistem keuangan daerah, pengendalian internal dan transparansi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. (Studi Kasus Pada Kelurahan Madyopuro)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Bagaimana sistem keuangan daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana daerah?
3. Bagaimana pengendalian internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana daerah ?
4. Bagaimana transparansi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh sistem keuangan daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
4. Untuk mengetahui bagaimana transparansi berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi orang-orang yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang signifikan pada bidang ilmu akuntansi sektor publik dan teori agensi dengan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Pengendalian internal yang transparans dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat mendukung pengembangan keterampilan akuntansi desa, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien. Penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah perangkat desa (sebagai agen) sudah bertindak sesuai dengan kepentingan Masyarakat desa atau apakah ada potensi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antara agen dan prinsipal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan peran perangkat desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

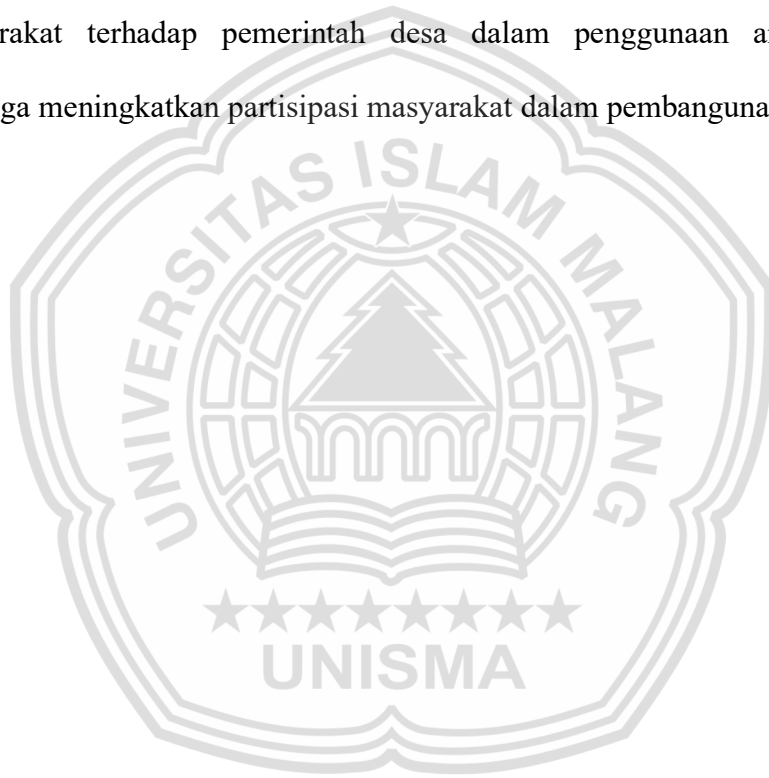
1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran dapat

meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan transparan.

1 Bagi Masyarakat

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dicapai melalui penerapan sistem keuangan daerah, pengendalian internal yang baik, dan transparansi anggaran dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penggunaan anggaran, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai **Pengaruh Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan Transparansi Anggaran Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Kelurahan Madyopuro)** , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sistem Keuangan Daerah di Kelurahan Madyopuro telah diterapkan melalui penggunaan aplikasi SISKEUKEL, yang berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Penerapan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan keakuratan data keuangan, serta meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan demikian, sistem keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian Internal yang diterapkan di Kelurahan Madyopuro belum berjalan cukup efektif, terutama sekretaris dan bendahara dijabat oleh orang yang sama umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan organisasi, khususnya di tingkat desa atau kelurahan. Dalam kondisi tertentu, jumlah aparatur yang tersedia tidak mencukupi untuk mengisi seluruh jabatan struktural secara terpisah, sehingga satu orang diberikan tugas rangkap untuk menjaga agar kegiatan administrasi dan keuangan tetap berjalan. namun pengendalian yang lain sudah cukup efektif terutama melalui mekanisme

pemeriksaan berjenjang, dokumentasi bukti transaksi, serta pengawasan oleh perangkat kelurahan dan pihak terkait. Pengendalian internal ini berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan aturan dan mencegah penyimpangan. Dengan adanya pengawasan yang kuat, keandalan laporan keuangan meningkat dan akuntabilitas semakin terjaga.

Transparansi Anggaran di Kelurahan Madyopuro telah diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, seperti publikasi laporan kegiatan dan anggaran melalui papan informasi, media sosial, serta forum Musrenbang. Keterbukaan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Penerapan sistem keuangan daerah yang modern, pengendalian internal yang kuat, dan transparansi anggaran yang menyeluruh membentuk sinergi yang optimal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi, menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Madyopuro masih belum menunjukan praktik *Good Governance* yang baik, dikarenakan adanya rangkap jabatan yang membuat adanya penyalahgunaan jabatan dan konspirasi dan praktik tidak sehat dalam suatu organisasi pemerintahan. Namun sudah cukup baik terutama dalam aspek keterbukaan, partisipasi publik, dan tanggung jawab

aparatur terhadap penggunaan dana publik. Hal ini menjadi contoh penerapan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di tingkat kelurahan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- Penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke kelurahan lain.
- Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sangat bergantung pada keterbukaan informan, sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektif.
- Keterbatasan waktu penelitian membuat peneliti belum dapat mendalami seluruh aspek teknis penerapan akuntansi berbasis akrual melalui aplikasi Siskeudes.
- Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi kendala dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait transparansi laporan keuangan desa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Madyopuro

Diharapkan dapat terus meningkatkan pemanfaatan Sistem Keuangan Kelurahan (SISKEUKEL) agar pengelolaan keuangan semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Pemerintah kelurahan juga perlu memperkuat pengawasan internal dengan melakukan evaluasi rutin terhadap setiap tahap

pelaksanaan anggaran serta memberikan pelatihan bagi aparatur kelurahan agar lebih memahami prinsip tata kelola keuangan yang baik sesuai regulasi terbaru dan juga agar segera mengisi jabatan yang kosong agar tidak adanya rangkap jabatan untuk meminimalisir adanya praktik tidak sehat dan manipulasi .

2. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengawas

Diharapkan untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan teknis kepada aparat kelurahan, khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait agar sistem pengawasan berjalan lebih optimal dan efektif.

3. Bagi Masyarakat Kelurahan Madyopuro

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran perlu terus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam forum Musrenbang dan kegiatan publik lainnya agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat benar-benar terwujud. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian lebih lanjut. Disarankan agar penelitian mendatang melibatkan lebih banyak responden dan wilayah penelitian yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan serta memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai pengaruh sistem keuangan, pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di berbagai tingkat pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) Melina marcori ludani Gustaf budi tampi Jericho pombengi. (2017). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Amrul, R. B. P. dan A. M. (2024). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Budiman Slamet, & Nadia Dwi Irmadiani. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.634>
- F.Albugis, F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparancy and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA*, 78(3), 78–089.
- Fiqri, A. A., & Sari, I. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 79–90. <https://doi.org/10.33476/ms.v5i2.928>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hakiki, M. A., & Hidayat, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 1–8.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1–5. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Liow, M. S. ., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan*

Daerah, 20(01), 14–25. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23450.20.01.2019>

- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Maruta, H. (2015). Peran Penting Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 27. <https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1885>
- Mokoginta, N. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2443>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Novatiani, K. dan V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset*, ..., 6. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2038/2045>
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Skripsi*, 162.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tania, M. (2020). *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat*.
- Tryana. (2020). Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa Tahun 2025. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–800.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

